

ISSN 1693-6248



Cakrawala

Jurnal Penelitian Sosial
Journal of Social Research

Peter Suwarno Political and Religious Communication in Indonesia

Anastasia Yuni W. Celebrating Pluralism by Mochtar Lubis Award

Antik Tri Susanti Politik Perempuan di Titik Nol

Arief Fajar Hilangnya Trust dalam Ruang Publik

Bambang Sukma W. Konflik Ideologis Ahmadiyah-MUI

M. Najib Husain Representasi Identitas Kultur Anak Papua dalam Media Massa

Tomi Febriyanto Identitas Diri, Liyan, Pluralitas dan Media Baru

Arif Muslimin Terorisme Bukan Ajaran Pesantren

Sri Hastjarjo Teknologi Komunikasi dan Perluasan Ruang Publik

Elvinaro Ardianto Media Kontemporer, Pluralitas Politik, dan Pluralitas Agama

Fajar Junaedi Manajemen Pemberitaan Televisi dalam Berita Terorisme

Lukiati Komala Media Massa, Pluralitas Politik dan Agama

Noveina Silvyani D.,
Maria Yuliasuti Peran Media Massa dan Perspektif Jurnalisisme Damai

Santi Indra Astuti Love-Hate Relationship

Finsensius Yuli P. Peran Media Baru dalam Melaporkan Kekerasan Agama



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU KOMUNIKASI
Universitas Kristen Satya Wacana

Vol. 1 No. 2 Des 2011
(Edisi Khusus)

Jurnal Penelitian Sosial

Pelindung

John A. Titaley

Penanggungjawab

Pamerdi Giri Wiloso

Penyunting/Penyelia

Sri Suwardiningsih

Penyunting Pelaksana

Daru Purnomo

Penyunting

John J.O.I Ihalaw, Royke Siahnenia,

John R.Lahade, Dewi Kartika Sari, Sampoerna,

Pamerdi Giri Wiloso, Rullyanti Puspowardhani,

Mustika Kuri Prasela, Ricco Sumtaki, Sih Nathalia,

R. Ina Hunga.

Penyunting Tamu

Nico Schulte Nordholt

Frans HÜsken

Staf Administrasi

Rizki Herendra HA

Penerbit
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711

Telp. (0298) 321212, Ext. 339

Fax (0298) 321433

E-mail : fiskom@admin.uksw.edu

SAMBUTAN DEKAN FISKOM-UKSW

Setiap warga masyarakat modern kiranya tidak akan menyangkal bahwa abad 21 ditandai dan sangat dipengaruhi oleh fenomena globalisasi dan perkembangan ICT (Information and Communication Technology). Ruang lingkup kehidupan negara (*state sphere*), kehidupan publik (*public sphere*), kehidupan pasar (*market sphere*), dan bahkan kehidupan pribadi (*private sphere*) yang saling berinteraksi bertambah kuat dalam dinamika melebar dan menyempitnya. Dalam tataran wacana internasional, ditekankan bahwa salah satu dampak perkembangan ICT di era globalisasi adalah berkembangnya institusi media, yang disebut-sebut sebagai salah satu pilar pokok dalam proses demokratisasi di samping tiga pilar lainnya: institusi- institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, proses demokratisasi, desentralisasi dan pemberdayaan *civil society* juga berdampak dalam perkembangan media. Tatkala ruang kehidupan publik (*public sphere*) melebar, berbagai jenis media bertumbuh bak cendawan di musim penghujan dan bisa bergerak bebas sebebaskan-bebasnya. Pertanyaan yang muncul adalah: sebagai sebuah pranata, seberapa besar peran media dalam ruang lingkup kehidupan negara (*state sphere*), kehidupan publik (*public sphere*), kehidupan pasar (*market sphere*), dan bahkan kehidupan pribadi (*private sphere*). Pertanyaan ikutanannya adalah, tatkala media juga beranekaragam dalam pandangan dan visi ideologis, seberapa kuat pula media bersikap sektarian, atau

memihak kelompok-kelompok tertentu, baik yang berafiliasi secara politik maupun secara keagamaan. Kiranya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dalam seminar ini. Selamat mengikuti seminar!

Dalam kesempatan ini pula saya menyambut baik, naskah naskah seminar ini di publikasikan, secara khusus dalam Jurnal Cakrawala Vo. 1 No. 2 Desember 2011 sebagai Edisi khusus.

Salam,

Dr.Pamerdi Giri Wiloso

Cakrawala

Jurnal Penelitian Sosial

Daftar Isi:

POLITICAL AND RELIGIOUS COMMUNICATION IN INDONESIA : A PRELIMINARY LOGOLOGICAL ANALYSIS Peter Suwarno	1-19
CELEBRATING PLURALISMBY MOCHTAR LUBIS AWARD Anastasia Yuni Widyaningrum	20-33
POLITIK PEREMPUAN DI TITIK NOL DALAM BENGKEL MASYARAKAT HANDPHONE Antik Tri Susanti.....	34-49
HILANGNYA TRUSTDALAM RUANG PUBLIK Arief Fajar.....	50-59
KONFLIK IDEOLOGIS AHMADYAH-MUI DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA KOMUNIKASI SOSIAL ANGGOTA JEMAAT AHMADYAH DI INDONESIA Bambang Sukma Wijaya	60-75
REPRESENTASI IDENTITAS KULTUR ANAK PAPIA DALAM MEDIA MASSA M. Najib Husain.....	76-91
IDENTITAS DIRI, LIYAN, PLURALITAS DAN MEDIA BARU: KONSTRUKSI SOSIAL POLITIK IDENTITAS DAN PLURALITAS DALAM MEDIA BARU Tomi Febriyanto	92-108
TERORISME BUKAN AJARAN PESANTREN (STUDI KASUS PENDEKATAN PESANTREN AL MUKMIN NGRUKI KEPADA MASYARAKAT) Arif Muslimin	108-119

**POLITICAL AND RELIGIOUS COMMUNICATION
IN INDONESIA : A PRELIMINARY LOGOLOGICAL
ANALYSIS**

Peter Suwarno, Ph.D.¹

Indonesia is the fourth most populous country in the world and the most populous Muslim country. According to law, Indonesians must profess adherence to one of six recognized state religions, including Islam, Buddhism, Hinduism, Catholicism, Protestantism, and Confucianism. The state ideology Pancasila, however, makes it possible for Indonesia to position itself neither as a religious state nor as a totally secular one.² In the past two decades, Indonesia has gone through a significant religious, especially Islamic, transformation, such that religions have very important roles in the country's political life. This condition makes it acceptable for political communication to sound religious and religious communication to be political.

One of the most important characteristics of religious communication such as sermons in places of worships is the use of typical antitheses of good versus evil and reward versus punishment. The rhetoric of "good and evil" has always been

¹Peter Suwarno, Ph.D. is an Associate Professor and the Associate Director of the School of International Literatures and Cultures, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA. He can be contacted at peter.suwarno@asu.edu.

²Pancasila is the Indonesian state ideology with five basic principles 1) belief in one and only God, 2) just and civilized humanity, 3) the unity of Indonesia, 4) democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives, and 5) social justice for the whole of the people of Indonesia.

Teknologi Komunikasi dan Perluasan Ruang Publik di Koran Lokal Untuk Membangun Pluralisme dalam Masyarakat
Sri Hastjarjo 120-131

MEDIA KONTEMPORER, PLURALITAS POLITIK, DAN PLURARITAS AGAMA: FENOMENA JURNALISME WARGA DAN JURNALISME KEMISKINAN
Elvinaro Ardianto 132-145

MANAJEMEN PEMBERITAAN TELEVISI DALAM BERITA TERORISME
Fajar Junaedi 146-160

MEDIA MASSA, PLURALITAS POLITIK DAN AGAMA : PERSPEKTIF TEORI KRITIS
Lukiati Komala 161-175

PERAN MEDIA MASSA DAN PERSPEKTIF JURNALISME DAMAI DITENGAH PLURALITAS SARA DI INDONESIA
Noveina Silvyani Dugis, Maria Yuliasuti 176-198

LOVE-HATE RELATIONSHIP : WACANA AHMADIYAH DALAM BINGKAI PERS ONLINE LOKAL
Şanti Indra Astuti 199-219

PERAN MEDIA BARU DALAM MELAPORKAN KEKERASAN AGAMA DI INDONESIA : BERACERMIN DARI KASUS AHMADIYAH
Finsensius Yuli Purnama 220-223

ISSN 1693-6248

Vol. 1 No. 2 Des 2011

PERAN MEDIA MASSA DAN PERSPEKTIF JURNALISME DAMAI DITENGAH PLURALITAS SARA DI INDONESIA

Noveina Silvyani Dugis, S.Sos.,M.A.¹
Maria Yuliasututi, S.Sos.²

ABSTRACT

Bhineka Tunggal Ika, unity in diversity, that is the motto of Indonesia which has been known as a thousand-island nation. Globalization and the advances of technology and information have also brought a huge influence in almost every aspect of human life, including socio-cultural dimension and socio-political. Thus, the roles of mass media as the main agent in the transaction of information become significant. The mass media are expected to represent themselves as a major of public sphere, then also helped to determine the dynamics of social, political and culture at the local and global stage. Among the plurality of Indonesian society, the treat of SARA (Suku: tribe/ethnic; Agama: religion/faith; Ras: race/blood; Antar-golongan: inter-group) conflict is crucial and important to be noticed. Since conflict is the most interesting news value, the news coverage of mass media then holds an absolute power in shaping public opinion. Not only loved by the media alone, the audience was considered to be very enthusiastic readers for news of conflict as well. Conflicts using violence in all its forms are always interesting. Especially when conflict is associated with politically laden of mass media industry that has lots of interests and problems in it. The problem of reporting the conflict has become increasingly more bizarre and more complex when addressed the mainstream ideology of the journalist profession that emphasizes the two-

¹ Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya

² Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya

dimensional concept of "objectivity" publications that is factuality and impartiality. In a news text of conflict, the problem of completeness and accuracy, relevance of a fact are to be of great importance for the quality of news. The role of mass media in conflict situations such as this becomes very important. Of the three roles of mass media in reporting the case of conflict, only two roles are taken. First, as the issue intensifier/sharpen conflicts (Republika's case in SARA conflict in Ambon) and as the conflict diminisher/hider conflicts (Kompas and Suara Republika's case in SARA conflict in Ambon). None of the mass media has established itself as part of the conflict resolution process in reporting news of conflict.

Key words: *plurality, conflicts, mass media, peace journalism.*

1. PLURALITAS SARA SEBAGAI WACANA YANG SENSITIF

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang kaya akan budaya. Bangsa seribu pulau ini juga banyak disebut-sebut sebagai bangsa yang sarat akan benturan kepentingan berlatar belakang konflik antar-Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Menurut Syafie (2009:10) dalam bukunya *Sistem Politik Indonesia*, secara keseluruhan pulau di Indonesia berjumlah 13.667 pulau besar dan kecil yang terbagi menjadi 6.044 pulau yang telah diberi nama dan 7.623 pulau yang belum diberi nama. Ditambah lagi data yang mencatat bahwa ada banyak pemberitaan tentang kerusuhan dan konflik berbau SARA yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998³. Pluralisme atau keberagaman latar belakang yang notabene menjadi penyebab timbulnya konflik kepentingan ini kemudian menjadi ancaman bagi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Boleh dibilang banyak pihak yang pesimis ketika membahas soal pluralisme SARA di Indonesia. Pasalnya sudah tertalu banyak peristiwa konflik berbasis SARA yang tak

³ <http://www.fica.org/hr/id/RiotsDataSinceNov98.html>

menemukan titik terang sebagai solusi, malahan menelan banyak korban baik secara moril maupun materil. Pesimisme ini kemudian menjadi wajar melihat bahwa indikator utamanya adalah peningkatan tindak kekerasan yang mengatasnamakan SARA di berbagai belahan bumi Indonesia.

Pluralisme kemudian menjadi wacana yang sensitif. Makna kata pluralisme itu sendiri sangat luas dan multi-interpretatif. Lalu, bagaimana seharusnya bangsa Indonesia yang sedemikian plural ini menghadapi tuntutan keberagaman kepentingan demi terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya?

Siapa yang tidak ingat dengan konflik antar-agama yang terjadi di Ambon, Maluku Utara tahun 1999-2002? Di Indonesia, perspektif jurnalisme damai mulai menjadi sebuah wacana ketika terjadi konflik Ambon tersebut dan menyusul konflik-konflik lain atas dasar SARA. Indonesia memang telah mengalami banyak insiden kekerasan sejak 1998, mulai dari kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13-14 Mei 1998 di Jakarta, konflik di Maluku tahun 1999-2002, pembersihan etnis Madura di Sampit, Kalimantan Barat tahun 2000, darurat sipil di Aceh, dan konflik Muslim-Kristen yang kronis di Poso sejak Desember 1998.

Kontroversial mengenai topik pluralisme kian hangat, sebagian menilai pluralisme sebagai ancaman dan sebagian lagi menyatakan pluralisme sebagai unsur perekat semboyan kebhinekaan Indonesia. Mulai dari sulitnya mendapat ijin pendirian tempat beribadah sampai perusahaan bahkan penghancuran tempat-tempat ibadah. Oknum pelakunya pun sangat beragam, mulai dari individu sampai kelompok organisasi tertentu. Sederet peristiwa konflik berbasis SARA yang kembali terjadi akhir-akhir ini seperti penusukan pendeta HKBP, kasus penyerangan kelompok Ahmadiyah di Banten, pengeboman Masjid di Cirebon,

pengeboman gereja Kristen di Solo, kerusuhan yang berkepanjangan di Papua, penembakan karyawan PT Freeport di Timika, masih merupakan secul bukti bahwa kesatuan dalam keberagaman hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Semakin meratanya kekerasan dan diskriminasi terhadap pemeluk agama dan/atau pengikut aliran kepercayaan tertentu ini membentuk padangan baru yang membuktikan bahwa perbedaan merupakan pangkal kekerasan.

Pada artikel di *New York Times*, tertera kalimat: *Some of the rappers said: "You must be raped because you are Chinese and non-Moslem,"* artinya beberapa pemerksosa yang terjadi waktu kerusuhan 12 dan 13 Mei 1998 mengatakan, kamu harus diperksosa karena kamu orang Cina dan bukan orang Islam (Syafie, 2009:51). Apakah benar bahwa pandangan demikian merupakan ajaran agama Islam? Sedangkan dalam salah satu penafsiran ajaran agama Islam sendiri, setiap tindak pelecehan seksual harus dihukum cambuk sampai mati.

Sensitifitas akan topik SARA di Indonesia ini kian menarik ketika yang menjadi sumber perantara informasi tersebut adalah media massa. Fungsi utama media sebagai agen informasi dan ruang publik (*public sphere*) tentu saja turut menentukan bagaimana tingkat intensitas dan sensitifitas isu SARA ini dikembangkan ditengah masyarakat majemuk. Setiap institusi media memproduksi dan mengemas berita konflik dengan gaya penulisan dan *frame* / bingkai tertentu yang kemudian menjadi konsumsi publik. Proses produksi berita ini merupakan dasar penilaian perspektif yang digunakan industri media tersebut dalam merekonstruksi sebuah realitas.

2. FRAMING BERITA KONFLIK, REKONSTRUKSI REALITAS DAN INDUSTRI MEDIA MASSA

Fishman seperti dikutip Eriyanto (2002:100-101) mengatakan ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat, yaitu tahap seleksi berita dan pembentukan berita. Proses seleksi berita (*selection of news*) yang melahirkan teori *gatekeeper* ini melihat wartawan melakukan seleksi di lapangan, mana yang penting mana yang tidak, mana peristiwa yang bisa diberitakan dan mana yang tidak. Setelah itu redaktur akan menyeleksi dan menyunting berita dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas di luar wartawan yang benar-benar *riil* dan diseleksi oleh wartawan untuk dibentuk dalam sebuah berita.

Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*) yang melihat bahwa sebuah peristiwa bukan/tidak diseleksi melainkan dibentuk. Wartawan membentuk peristiwa, mana yang dapat disebut berita dan mana yang tidak. Wartawan aktif, dia berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarainya, dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan.

Disini, seorang wartawan atau jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyajikan berita dengan secepat-cepatnya kepada khalayak luas melalui media massa. Namun, dalam melakukan proses produksi berita seorang wartawan sebenarnya melakukan proses rekonstruksi realitas. Sebuah berita berasal dari sebuah peristiwa yang juga adalah realitas, dan pada dasarnya setiap hari manusia pasti mengalami berbagai macam peristiwa dan realitas sosial. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua peristiwa dan realitas sosial dapat dijadikan atau digolongkan sebagai berita.

Secara teoritis ada banyak definisi mengenai berita, definisi yang diutarakan oleh Edward Jay Friedlander, dkk. yang dikutip oleh Budyatna (2005:39), dikatakan bahwa berita adalah apa yang harus Anda ketahui yang tidak Anda ketahui, apa yang terjadi belakangan ini yang penting bagi Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari, apa yang menarik bagi Anda, dan menggairahkan Anda untuk mengatakannya kepada orang lain. Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi dan mempengaruhi hidup Anda, kejadian yang tidak disangka-sangka, dan tidak dapat diprediksi. Sedikit berbeda dengan pendapat yang mendefinisikan berita sebagai laporan yang tepat waktu mengenai fakta-fakta atau opini yang memiliki daya tarik, atau hal penting, atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.

Berita konflik kemudian disinyalir sebagai obyek berita paling menarik. Hal ini didukung oleh pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa nilai tertinggi atau nilai yang paling diminati oleh publik adalah nilai berita konflik. Mengapa?

Julian Harris, Kelly Leiter, dan Stanley Johnson menyebutkan delapan unsur nilai berita yang diurutkan berdasarkan prioritas/nilai tertinggi sebiah berita (Abrar, 2005: 3-5):

- Konflik, artinya informasi yang menggambarkan pertentangan antar manusia, bangsa, dan Negara
- Kemajuan, artinya informasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Penting, artinya informasi yang penting bagi khalayak untuk menjalani kehidupan sehari-hari
- Dekat, artinya informasi yang memiliki kedekatan emosional dan geografis dengan khalayak
- Aktual, artinya informasi yang baru saja terjadi
- Unik, artinya informasi tentang peristiwa yang unik, jarang terjadi

- Manusiawi, artinya informasi yang bisa menyentuh emosi khalayak, seperti yang bisa membuat menangis, terharu, tertawa, dan sebagainya
- Berpengaruh, artinya informasi mengenai peristiwa yang berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak

Dengan demikian, sebuah berita diharapkan mampu dimanfaatkan para pembacanya agar dapat mengelak atau menghindari dari bahaya yang tidak diinginkannya, atau paling tidak dapat membantu pembacanya mencapai cita-cita atau keinginannya dalam kehidupan sosial. Berita yang adalah produk dari jurnalisme ini pada dasarnya merupakan laporan tentang suatu peristiwa. Sehingga proses jurnalisme yang terjadi yaitu upaya menceritakan kembali suasana, keadaan, orang, benda, bahkan pendapat yang ada dalam suatu peristiwa, sebenarnya merupakan upaya untuk merekonstruksi realitas.

Tugas redaksional media massa yang terdiri dari wartawan, editor, redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi adalah menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut. Isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (*construct reality*) oleh pekerja media. (Birowo-editor, 2004:168).

Realitas yang dikonstruksi kembali oleh pekerja media maupun institusi media inilah yang menjadi hal yang menarik. Oleh karena itu perlu dicermati apakah sebuah realitas yang dijadikan berita itu sesuai dengan faktanya atau merupakan hasil rekonstruksi dari sebuah industri media. Sehingga pemahaman mengenai perbedaan antara fakta, interpretasi, dan opini dari para pekerja media khususnya seorang wartawan, menjadi sangat penting.

3. PERAN MEDIA MASSA DITENGAH PLURALITAS SARA

Peran media massa dalam situasi konflik menjadi sangat penting. Dari tiga peranan media massa dalam kasus konflik,

hanya dua peran yang diambil, yakni sebagai pemertajam konflik (kasus Republik dalam konflik SARA di Ambon) dan sebagai penyembunyi konflik (kasus Kompas dan Suara Pembaruan dalam konflik SARA di Ambon). Tidak satupun yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik (Pantau, edisi 09/ 2000:41). Media massa selalu dihadapkan pada pilihan sulit ketika berhadapan dengan topik sensitif seperti ini. Dalam liputan berita, dikenal istilah '*bad news is good news*,' sehingga media kian 'galau' dalam memposisikan dirinya ditengah isu pluralitas SARA.

Sebenarnya ada banyak alasan mengapa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam situasi konflik. Tapi satu hal yang ingin ditekankan disini adalah peran media dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan menerapkan perspektif jurnalisme damai dalam meliput dan menyajikan peristiwa tersebut. Disinilah seorang wartawan dituntut agar dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga seorang wartawan harus mampu bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya. Idealisme seorang jurnalis menjadi taruhannya ketika ia harus 'berperang' melawan nurannya sendiri. Berperang di antara tuntutan profesi dan kepentingan bisnis (keuntungan perusahaan tempat ia bekerja) yang mengharuskannya membidik suatu peristiwa yang booming dan layak dijual.

Berdasarkan pengalaman dari berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia sebelumnya, peran media banyak dikaburkan oleh institusi media itu sendiri dalam meliput dan menyampaikan beritanya. Sebut saja konflik antara umat Islam dan Kristen yang terjadi di Ambon, berita mengenai konflik agama tersebut cukup banyak dimuat di media massa. Tiap media mempunyai *frame* yang berbeda mengenai peristiwa ini. Contoh jelas nampak pada Kompas dan Republik yang dengan

ideologi masing-masing menjadi tidak netral lagi dalam meliput peristiwa tersebut dan secara implisit malahan berpihak pada salah satu kubu yang terlibat konflik (Pantau, edisi 09/2000).

Media dalam menjalankan fungsinya sebagai agen berita yang paling dipercaya publik untuk mendapatkan informasi, ternyata mampu melakukan politik pemaknaan. Sehingga pada akhirnya media bukan hanya menentukan realitas macam apa yang akan mengemuka, namun juga siapa yang layak dan tidak layak masuk menjadi bagian dari realitas tersebut. Media menjadi sebuah kontrol yang mampu mempengaruhi bahkan mengatur isi pikiran dan keyakinan-keyakinan masyarakat itu sendiri. Media menunjukkan bukan hanya apa yang dapat dan harus dipikirkan namun juga bagaimana masyarakat harus berpikir tentang realitas (Leksono, 1998 dalam Birowo-editor, 2004:175-176).

Realitas yang harus dipikirkan oleh masyarakat ini pada umumnya lebih dikenal sebagai sebuah berita. Para pekerja media dengan 'susah payah' membentuk atau memformat ulang realitas yang terjadi kedalam sebuah berita yang dianggap lebih baik dan aman untuk dikonsumsi pembacanya. Seluruh isi media massa pada dasarnya merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Dalam menyusun sebuah berita tuntutan jurnalisme harus dipenuhi, antara lain tuntutan teknis (elemen berita dan struktur penulisan berita), tuntutan idealisme (obyektifitas berita: *factuality* dan *impartiality*), dan tuntutan pragmatisme (dinamika internal dan eksternal media massa).

Media sebagai sebuah industri tidak berdiri sendiri, melainkan berada dibawah bayang-bayang beberapa kepentingan seperti ekonomi, politik, ideologi, dan sebagainya yang bisa menjadi roh bagi sebuah berita. Hal tersebut berdampak pada pembuatan berita tidak sekedar dalam hal bagaimana realitas

tersebut dikonstruksi tetapi juga kepentingan apa saja yang membungkus berita tersebut.

Di antara ketiga tuntutan tersebut, media massa sering terlibat dalam tarik menarik antara tuntutan idealisme dan pragmatisme. Banyak faktor yang mempengaruhi konstruksi realitas media baik eksternal misalnya kondisi politik di waktu dan tempat media itu berada, maupun faktor internal seperti kepentingan-kepentingan yang bisa tumpang tindih pada tingkat perorangan atau kelompok dalam sebuah organisasi media. Kepentingan itu antara lain bisnis, politik, ideologi, teknis, masalah agama, kedaerahan, aliran, dan kepercayaan maupun struktur media itu sendiri. Dari faktor internal, sosok jurnalis paling disorot karena sebagai manusia setiap jurnalis memiliki sikap, nilai, kepercayaan, dan orientasi tertentu terhadap politik, agama, ideologi, dan aliran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Faktor lain yang ikut mempengaruhi wartawan dalam mengkonstruksi suatu realitas adalah latar belakang pendidikan, jenis kelamin, etnis dan aliran kepercayaan. Semua komponen tersebut berpengaruh terhadap isi media (*media content*) yang akan menjadi konsumsi publik.

Media massa sebagai institusi sosial juga bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain dalam bentuk relasi ekonomi, politik dan sosial. Semua aspek itu pula ikut mempengaruhi media dalam mengangkut sebuah realitas. Media mengalami dilema, apakah harus mengabdikan pada sebuah kepentingan tertentu atau menyatakan diri sebagai kelompok yang bebas dalam menjalankan profesi? Media berada di antara dua pilihan, menjalankan misi tertentu atau memuaskan diri sebagai profesional. (Sudibyo dkk, 2001:63-69)

Berita sebagai hasil rekonstruksi sekaligus sebagai bagian dari proses jurnalisme, tidak akan pernah bisa bebas nilai.

Artinya, akan selalu ada hal-hal yang mempengaruhi berita tersebut selama proses produksi berita. Seperti yang disampaikan oleh Ashadi Siregar (1998:19) dalam buku *'Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa,'* media massa memiliki dua pilihan tujuan ketika memuat berita, yaitu untuk memenuhi tujuan politik keredaksian media itu sendiri atau memenuhi kebutuhan khalayak pembacanya. Media massa yang mementingkan tercapainya tujuan ekonomis akan memilih berita yang bernilai jual tinggi. Namun media massa yang ingin agar informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembaca akan memuat berita-berita yang berguna bagi khalayak. Ada pula media massa yang menganggap informasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologis. Informasi disampaikan untuk mempengaruhi dan membujuk khalayak agar berbuat dan bersikap sesuai dengan tujuan ideologis yang hendak dicapai oleh media massa tersebut.

Dalam hal ini yang penting untuk diperhatikan adalah proses konstruksi makna dibalik peristiwa atau realitas yang direpresentasikan oleh teks media. Konstruksi makna yang dilakukan oleh media akan sangat berpengaruh pada isi atau teks berita yang akan muncul di media yang akan dikonsumsi oleh khalayak luas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apa yang diperoleh oleh khalayak bisa jadi merupakan hasil konstruksi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Tuchman dalam *Making News* mengatakan bahwa berita adalah jendela dunia. Melalui berita kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di tempat lain. Tetapi apa yang kita lihat, dengar, dan ketahui tergantung pada jendela yang kita pakai. Apakah jendela itu besar atau kecil, berjeruji atau tidak, bisa dibuka lebar atau tidak, jendela itu terhalang atau tidak.

Dalam berita, jendela tersebut kita sebut sebagai *frame* (bingkai). Pandangan kita terhadap sesuatu dipengaruhi oleh media, khususnya *frame* media, bagaimana peristiwa dilihat, ditampilkan, dan ditonjolkan oleh media. Analisis framing melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*, melainkan wartawan dan medialah yang secara aktif membentuk realitas. (Eriyanto, 2002:3-7).

Menurut aliran konstruktivis, sebuah fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita, melainkan dikonstruksi sedemikian rupa. Realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, namun sebaliknya realitas itu selalu diproduksi. Fakta yang berupa kenyataan sebenarnya hanya ada di benak kita yang melihat fakta tersebut. Media bukanlah sekadar saluran bebas, melainkan juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, perspektif, dan pemihakannya. Maka tepat jika dikatakan bahwa media merupakan agen rekonstruksi realitas.

4. BERITA KONFLIK DALAM MEDIA MASSA DAN PERSPEKTIF JURNALISME DAMAI

Menurut Syahputra dalam bukunya yang berjudul *'Jurnalisme Damai'* (2006:84), *framing* berita dan *agenda setting* dapat mengurangi usaha untuk menyelesaikan konflik. Pasalnya, media cenderung untuk membingkai peristiwa konflik sebagai suatu pertempuran. Secara teoritis setidaknya ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik menurut Eriyanto & Muhammad Qodari dalam Pantau edisi 09 (2000:41-42).

Pertama, media sebagai *issue intensifier*, yakni media berposisi memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Kedua, media sebagai *conflict diminisher*, yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media

meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis maupun pragmatis. Ketiga, media sebagai pengarah *conflict resolution*, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.

Media dinilai belum mampu menentukan strategi yang tepat dalam menurunkan liputan tentang konflik dengan unsur SARA. Alih-alih memiliki strategi liputan konflik, media malahan kebingungan menempatkan diri saat dihadapkan pada konflik. Sehingga hanya ada dua pilihan yaitu terlibat dan memihak atau menghindari konflik.

Media dan pers dapat diibaratkan pedang bermata dua. Pada satu sisi pers berpotensi mempertajam konflik ketika pemberitaan yang disajikan sarat dengan muatan yang tendensius, provokatif, dan sensasional. Pemberitaan media yang memusatkan pada jumlah korban dan kekejaman suatu kelompok dapat menggiring kemarahan khalayak, bukan hanya mereka yang berada di medan peperangan melainkan juga yang berada di luar arena. Ada banyak contoh lain, bagaimana media dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyerang dan menjatuhkan pemerintah. Demikian pula ada banyak penguasa yang menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaannya.

Pada sisi lain, media berpotensi untuk menjadi peredam konflik. Meskipun pers bukan lembaga perdamaian, dapat pula berperan untuk menuju ke arah perdamaian. Itu terjadi ketika berita yang diangkat mampu membangun opini menyejukkan dengan tetap memenuhi asas jurnalisme (objektif, akurat, dan seimbang).

Dalam hal ini pemberitaan media sebagai penyelesai konflik bukan berarti media memainkan peran yang

sesungguhnya dengan porsi tokoh agama dan atau politisi. Namun media dapat menyelesaikannya dalam batas-batasnya sebagai media, yakni menciptakan pemberitaan yang berimbang dan kondusif agar pihak-pihak yang bertikai tidak malah memperbesar penyebab konflik dan kesenjangan, melainkan pergi ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal inilah yang disebut sebagai model 'Jurnalisme Perdamaian' (*The Peace Journalism*).

Jurnalisme damai tidak memihak pihak manapun yang bertikai, tetapi lebih mengarahkan pada solusi perdamaian untuk penyelesaian konflik. Dimana dalam suatu konflik, juga pasti terdapat pihak-pihak yang mengaharapkan perdamaian.

Professor Johan Galtung (Syahputra, 2006: 90) seorang veteran mediator damai kelahiran Norwegia menyusun dasar bagi petunjuk praktis pertama, *Manual Jurnalisme Damai* guna menyampaikan apa yang harus diperjuangkan dalam jurnalisme damai:

1. Hindari menggambarkan konflik sebagai dua pihak yang memperebutkan satu tujuan yang sama. Hasil yang mungkin adalah salah satu menang dan yang lainnya kalah. Sebaliknya jurnalis damai akan memecah kedua pihak menjadi beberapa kelompok kecil, mengejar beberapa tujuan, membuka selang hasil yang lebih kreatif dan potensial
2. Hindari menerima perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat digunakan untuk membangun rasa bahwa pihak lain merupakan ancaman atau memiliki sikap yang diluar batas: *keduanya merupakan justifikasi untuk kekerasan*. Sebaliknya cari 'orang lain' dalam 'diri sendiri' dan sebaliknya. Jika suatu pihak menampilkan dirinya sebagai 'tokoh baik', ajukan pertanyaan mengenai

sejauh mana perbedaan sifat mereka sehingga dapat menggambarkan 'tokoh jahat' - bukankah akan mempermalukan mereka?

3. Hindari memperlakukan konflik sebagai sesuatu yang hanya terjadi di tempat dan waktu dimana kekerasan terjadi. Sebaliknya coba untuk menelusuri hubungan dan konsekuensi bagi orang di tempat lain pada saat itu dan di masa depan. Ajukan pertanyaan:
 - Siapa saja orang-orang yang dipertaruhkan?
 - Apa yang akan terjadi jika ?
 - Pelajaran apa yang akan diambil orang dari menyaksikan *event* tersebut secara keseluruhan sebagai bagian dari audiens global?
 - Bagaimana mereka memasuki kalkulasi pihak yang bertikai terhadap masa depan konflik

Disini, jurnalisme damai berusaha meminimalkan celah atau kesempatan terjadinya konflik dan pertikaian lanjutan yang merugikan banyak pihak. Upaya ini dilakukan tanpa mengulangi "fakta" yang dapat memperparah atau meningkatkan terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang bertawanan.

Dengan demikian jurnalisme damai merupakan cara membongkai berita yang lebih luas, seimbang, dan akurat dengan menggambarkan realitas dibalik analisa dan transformasi konflik. Pendekatan jurnalisme damai memberikan peta baru untuk menelusuri hubungan antara jurnalis dan narasumber, dengan cerita yang diliput dan konsekuensi peliputannya. Hal ini dikenal dengan istilah etika intervensi jurnalistik.

Jurnalisme damai membuka literasi non-kekerasan dan kreativitas yang diaplikasikan pada kerja praktis pelaporan yang dilakukan setiap hari. Sehingga perspektif ini 'cocok' bagi para jurnalis yang bekerja pada situasi dimana tidak mungkin untuk

tidak memikirkan tanggung jawab atas konsekuensi pelaporan mereka.

Syahputra (2006:94) menyampaikan bahwa berita yang berhasil melahirkan berita damai ditandai dengan:

1. Mendalami konflik dengan pandangan 'menang-menang'
2. Tidak menekankan pada efek nyata kekerasan.
3. Empati untuk semua pihak.
4. Proaktif - mencari cara untuk mengurangi kekerasan.
5. Berorientasi pada solusi (*solution oriented*).

Pada dasarnya, jurnalisme damai menawarkan sebuah cara untuk menghindari situasi konflik semakin panas. Jurnalisme damai menawarkan solusi perdamaian untuk mengatasi pertikaian melalui pemberitaan media massa yang berimbang. Apabila masyarakat terus-menerus dijejali dengan jurnalisme konflik, tentunya akan semakin memunculkan hal-hal negatif lainnya, masyarakat akan semakin pesimis dengan kondisi sosialnya. Padahal sebagai bangsa yang berkembang, Indonesia masih harus terus optimis memabngun keberagaman yang ada bukan justru sebaliknya.

4. KESIMPULAN

Peristiwa-peristiwa konflik yang kian marak terjadi nampaknya telah menjadi makanan pokok bagi awak pekerja media di Indonesia. Pasalnya Bangsa Indonesia yang memiliki semboyan 'Bhineka Tunggal Ika' ini, tidak mampu menjamin adanya perdamaian diantara kelompok-kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan SARA sampai saat ini ternyata masih menjadi salah satu penghalang terciptanya persatuan dan kedamaian bagi Bangsa Indonesia.

Memang benar jika dikatakan salah satu peristiwa yang paling digemari awak media adalah peristiwa dengan nilai berita konflik, khususnya konflik berbau SARA. Konflik menjadi bahan empuk media massa dan menjadi daya tarik bagi audiensnya. Peristiwa kerusuhan, perang antar-suku, konflik antar-warga, kekerasan dan penganiayaan yang belatar-belakang pluralisme SARA selalu menjadi berita utama dalam media cetak maupun elektronik dan media *online*. Berbagai liputan dan dialog bertema konflik gencar disampaikan, foto-foto maupun video konflik menjamur di layar kaca, surat kabar, dan media *online*.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi, media-media Indonesia berebut untuk berada paling depan dalam menyajikan berita dan informasi yang sensasional. Dalam situasi ini media kemudian memunculkan beragam adegan kekerasan dari berbagai peristiwa kerusuhan, perang, bentrokan, pembakaran, penyerangan, pembunuhan, dan sebagainya. Apapun perwujudannya di media, intinya adalah mengabarkan adanya konflik.

Menurut Yudi Perbawaningsih dalam *Media – Miliiter – Politik* (2002:159), media dengan anif mengatakan bahwa fungsi benar media adalah mendidik, menginformasikan, menjadikan rakyat "*well-informed*", sadar politik, sadar hukum, sadar banyak hal sehingga rakyat dapat waspada dan mandiri untuk melindungi diri sendiri. Namun di sisi lain, rakyat ternyata justru mengalami "*information overload*," kebingungan mencari sandaran media atau informasi yang benar dan akurat, merasa resah karena kriminalitas yang makin menjadi dan hukum yang tercabik-cabik. Media massa memang memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Peran media dalam memproduksi berita memiliki dua kecenderungan yaitu seleksi berita dan pembentukan berita. Dalam pandangan positivistik, realitasnya media hanya memiliki peran melaporkan. Media sebagai pelapor merasa bertanggung jawab untuk melaporkan konflik tersebut,

sehingga terciptalah kenyataan dalam benak khalayak bahwa memang di dalam masyarakat marak terjadi konflik.

Masyarakat secara terus menerus dibombardir hal yang sama akibat dari ke'tatahan media massa. Antara media satu dengan yang lain tidak ingin tersaingi karena kepentingan politik masing-masing demi meraih kue iklan. Media terasa pasif, berperan sebagai pelapor yang hanya melaporkan pandangan mata. Bahwa dalam kenyataannya di masyarakat Indonesia marak terjadi konflik, media memiliki kesan lebih-lebihkan. Padahal, disinilah peran media massa sebenarnya sangat dibutuhkan untuk penyelesaian konflik, bukan sebaliknya. Media sering muncul dengan peran 'mempertajam konflik' atau 'penyembunyi konflik' dan meninggalkan peran media sebagai proses 'penyelesai konflik.'

Ketika media tidak menggambarkan konflik sebagai dua pihak yang memperebutkan satu tujuan yang sama dan tidak menampilkan pihak-pihak yang bertikai secara frontal akan membantu menetralsir konflik. Dengan diperlakukan konflik sebagai sesuatu yang hanya terjadi di tempat dan waktu dimana kekerasan terjadi dan tidak mengekspose secara terus menerus juga akan membantu mengurangi terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Tayangan-tayangan yang informatif, mendidik sebagai usaha untuk memperkuat keberagaman sangat penting untuk terus disampaikan di media massa. Filosofi 'Bhineka Tunggal Ika' juga harus dipahami secara utuh oleh Bangsa Indonesia. Media massa sebagai pemilik kekuatan besar untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas, memiliki tanggung jawab yang tidak mudah. Pemberitaan konflik dengan prespektif jurnalisme damai yang solutif ('menang-menang') perlu diaplikasikan. Penggunaan atribut pemberitaan yang berbau kekerasan secara terus menerus juga perlu diwaspadai. Media massa harus memiliki empati kepada pihak yang bertikai, tidak hanya sekedar melaporkan.

Media juga diharapkan proaktif mencari cara untuk mengurangi kekerasan dalam pemberitaan dan tentunya tidak meninggalkan orientasi pada solusi penyelesaian konflik.

Mengutip pendapat Toeti Heraty Noerhadi dalam 'Media - Militier - Politik' (2002:145) menyatakan bahwa situasi krisis yang menunjukkan situasi batas menunjuk pada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pulih atau kemungkinan hancur. Pernyataan tersebut dengan jelas mengarah pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian ini hadir ketika informasi tidak tersedia atau tidak konsisten.

Bangsa Indonesia yang seperti ini sudah akrab sekaligus kebal terhadap situasi krisis, menyebabkan media-media Indonesia pun tidak mengalami beban yang berat dalam menyajikan informasi yang lengkap dan akurat. Terbukti bahwa dari sekian banyak krisis dan konflik yang melanda Bangsa Indonesia, belum ada satu pun media Indonesia yang mampu memberikan informasi yang benar dan konsisten mengenai krisis/konflik tersebut. Tidak satupun yang mampu berdiri sebagai media yang murni mencari kebenaran dan berpihak pada kepentingan publik semata.

Dalam kaitannya dengan pengutipan narasumber berita yang terlibat konflik juga perlu diperhatikan. Sebuah media massa hendaknya tetap berhati-hati dalam memilah kebenaran dari pernyataan narasumber. Komentar itu bebas, tapi fakta itu suci. Implikasi pentingnya adalah kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah milik semua orang. Namun komunikasi dan jurnalisme bukanlah istilah yang bisa dipertukarkan karena ada perbedaan yang signifikan antara jurnalisme opini dengan jurnalisme verifikasi.

Hal ini berkaitan dengan pemilihan narasumber yang dianggap layak memberikan suara menuju penyelesaian. Namun seorang wartawan haruslah cukup pintar dan cukup jujur untuk mengenali bahwa sebuah opini harus berdasarkan pada sesuatu

yang lebih substansial dari keyakinan pribadi 'jika hal ini digunakan untuk kepentingan jurnalisme.' Ini bukanlah tentang percaya kepada orang atau sekelompok orang. Ini adalah sebuah profesi yang berdasarkan reportase, proses belajar, pemahaman, dan pendidikan.

Sekalipun demikian, upaya media untuk menggosong tema perdamaian ditengah peristiwa konflik juga telah cukup banyak dilakukan. Namun hal ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Upaya media dengan menampilkan sisi kemanusiaan dan dampak negatif sebuah konflik bagi masyarakat, dinilai belum dibarengi dengan upaya perdamaian yang sepantasnya juga dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan.

Sebenarnya jika ditelaah lebih jauh, gagalnya kampanye perdamaian yang mungkin telah digalang media massa juga disebabkan karena masyarakat kehilangan acuan. Artinya, masyarakat jenuh menghadapi masalah-masalah serupa yang tak kunjung terselesaikan secara tuntas. Kehilangan acuan ini terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan merosotnya wibawa pemerintah di masa krisis seperti ini. Sering dijumpai inkonsistensi penerapan hukum, dimana hukum diberlakukan secara diskriminatif bahkan penegakan hukum dapat dikontrol oleh kelompok tertentu.

Menurut Kepala Suku Besar Amungme, Tom Beanal, seperti yang dikutip Ngadisah dalam 'Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua' (2003:252), penyebab merosotnya wibawa pemerintah dikarenakan:

"Dalam mata masyarakat, wibawa pemerintah maupun ABRI sudah jatuh sekali, antara lain karena orang dibiarkan membunuh orang di depan matanya tanpa bereaksi sedikitpun, dan tanpa mencari keadilan. Pokoknya dunia menjadi semakin gila" (Beanal dalam Kafiar, 2000:26)

Dalam setiap peristiwa konflik, kelompok yang bertikai akan membuat banyak keresahan dengan aksi kerusuhan, kekerasan bahkan aksi saling membunuh satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Pemerintah dan juga aparat kepolisian tidak mampu mengatasinya, disini terjadi gejala pengabaian hukum sehingga masyarakat merasa tidak perlu takut akan ditindak secara hukum. Apa yang terjadi ini bisa dikatakan merupakan cerminan hukum rimba. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat banyak yang bersandar pada kekuatan fisik, antara lain dalam bentuk kekuatan massa. Kekuatan ini dalam banyak kasus nampak lebih dominan dibanding kekuatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah sedang mengalami penurunan Wibawa. Pemerintah tidak mampu melakukan fungsinya untuk memberi rasa aman sama halnya dengan aparat keamanan. Masyarakat, dengan demikian, harus *survive* dengan upayanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 1994. *Penulisan Berita Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Birowo, M. Antonius - Editor. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gitanyali.
- Budyatna, Muhammad. 2005. *Jurnalistik - Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, dkk. 2004. *Media dan Konflik Etnis*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Media Development Laon Fund.
- _____. 2003. *Media dan Konflik Ambon*. Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara.
- _____. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

- Ispandriarno, Hantzsch, Loeffelholz - Editor. 2002. *Media - Militer - Politik: Crisis Communication - Perspektif Indonesia dan Internasional*. Yogyakarta: Galang Press.
- Mulyana, Dedy. 2002. *Analisis Framing Eriyanto - Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Sen, Krishna, Hill, David T. 2001. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan PT Media Lintas Inti Nusantara.
- Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stanley - Editor. 2004. *Elemen-Elemen Jurnalisme (Bill Kovach & Tom Rosenstiel)*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
- Sudibyo Agus, Ibnu Hamad, Muhammad Qodari. 2001. *Kabar-Kabar Kebencian (Prasangka Agama di Media Massa)*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Syafie, Inu Kencana & Azhari. 2009. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: P_Idea Kelompok Pilar Media.

Jurnal:

- Eriyanto dan Muhammad Qodari dalam Riset Utama: *Petaka Maluku (5)-Mempertimbangkan Jurnalisme Perdamaian*.

Majalah Pantau edisi 09/ Tahun 2000. Jakarta: Institusi Studi Arus Informasi.

Eriyanto dalam *Kajian: Koran, Bisnis, dan Perang*. Majalah Pantau edisi September 2002. Jakarta: Institusi Studi Arus Informasi.

Makalah :

Panji, Yearry. *Berita Konflik: Suatu Kritik Peran Media sebagai Ruang Publik dan Pilar Demokrasi*. Seminar Internasional Sebumi 3. Malaysia. 12-13 Oktober 2010.

Internet:

<http://www.fica.org/hr/idRiotsDataSinceNov98.html>

**LOVE-HATE RELATIONSHIP:
WACANA AHMADIYAH DALAM BINGKAI PERS
ONLINE LOKAL**

Santi Indra Astuti¹

ABSTRACT

As one of the most controversial issues concerning religious freedom in Indonesia, Ahmadiyah become favorite issue that never ceased to appear in Indonesia mass media. After a riot broke among anti-Ahmadiyah group vs. pro-religious freedom group in 2008, mass media nowadays focused on news concerning joint regulation produced by three ministries of the state (SKB) which prohibited Ahmadiyah members to disseminate their faith, and therefore, forbade them to enlarge amount of members as well. This research analyzes local online press in discussing Ahmadiyah. Employing framing model of Roger E. Entman over 10 online news on PR Online—the biggest media corporation in West Java—research was conducted on three different domains. The first domain focused on text of news stories provided by online media, the second domain concentrated on public discussion generated from the comment over the issue as attached on each piece of news stories. Meanwhile, the third domain discusses possible implications on pluralism discourse provided by public discussion and media frame over the issue of Ahmadiyah during 2011. At the end of this research, it is found that local online press in West Java has framed Ahmadiyah issue as a threat of peaceful order among members of society. By emphasizing the pro-contras over state regulation toward local administration on their coverage, local online press tried to maintain peaceful order by 'spoiling' anti-Ahmadiyah group, and by

¹ Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Kajian Jurnalistik Universitas Islam Bandung